

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan yang namanya pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karna itu suatu keharusan atau suatu pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan di Negara ini banyak sekali macamnya diantara pelayanan kesehatan. Kesehatan juga menjadi acuan dari negara itu sejahtera penduduknya atau tidak. Banyak daerah yang penduduknya terserang penyakit dan tidak bekerja dengan baik. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai hal dasar dari penopang kebutuhan kita. Akan tetapi, kita juga membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang kita ketahui kesehatan merupakan bagian yang terpenting dan utama juga dalam hidup, seperti ungkapan latin yang berbunyi “mens sana in corpore sano” yang artinya “didalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat”

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Semua orang ingin merasa dihargai, ingin dilayani, ingin mendapatkan kedudukan yang sama di mata para pemberi pelayanan dalam hal pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai Negara berkembang, dari waktu ke waktu dalam pelayanan kesehatannya sudah mengalami perkembangan atau kemajuan. Akan tetapi sering tidak sesuai dengan harapan yakni dengan masih banyak kendala dalam sistem pelayanan kesehatannya dan keluhan-keluhan seperti halnya akses pelayanan kesehatan yang belum bisa menjawab keinginan dari masyarakat, kecenderungan yang masih memposisikan masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan dilayani, banyaknya tenaga kerja kesehatan yang kualitas kerjanya belum ber-pengalaman, akan tetapi tidak sedikit juga yang sudah profesional dibidangnya, biaya pengobatan yang terlampau mahal sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu itu sangat memberatkan sekali

Dalam sistem kesehatan, sub sistem pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan sub sistem pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan

didefinisikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang diperlukan oleh individu, keluarga atau kelompok. Pola pembiayaan kesehatan yang umum dianut oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Jember sampai dengan saat ini adalah pola "reimbursement" atau free for service dimana masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan langsung membayar kepada penyedia layanan kesehatan begitu selesai mendapatkan pelayanan. Pola ini memiliki kelemahan dimana masyarakat tidak dapat mengendalikan jenis pelayanan maupun biaya yang dikeluarkan, karena penyedia pelayanan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan pendapatannya.

Cara yang ditempuh salah satunya dengan menambahkan layanan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh pasien. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengganti sistem reimbursement dengan sistem prepayment atau pra bayar. Prepayment atau pra bayar adalah Bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar yang dikenal di masyarakat beragam mulai kartu sehat, dana sehat, tabulin, jamkesmas, askes, jamsostek sampai asuransi kesehatan swasta, BPJS dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk masyarakat yang kurang mampu untuk pelayanan kesehatan. Karna dengan rakyatnya sehat, maka kesejahteraan sosial dari rakyat semakin membaik dan juga membawa nama baik daerah Jember. Pada umumnya masyarakat juga masih belum menilai kesehatan sebagai sebuah investasi. Oleh karena itu, pembiayaan untuk kesehatan masih belum menjadi prioritas ter-utama bagi masyarakat miskin. Dalam rangka meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat maupun daerah untuk mengentaskan kemiskinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang didalamnya termasuk juga program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat miskin

Masyarakat dikabupaten Jember sebagian besar sudah banyak memiliki jaminan pelayanan kesehatan yaitu semakin besarnya anggaran daerah yang dikeluarkan untuk PBID (penerima bantuan iuran daerah) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap tahun, tetapi banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu BPJS atau jamkesmas untuk berobat di rumah Sakit. Masyarakat miskin yang tersebar masih banyak tercecer dikabupaten Jember, yang tidak terdeteksi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Sebenarnya

Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwasannya masyarakat miskin itu memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat miskin terutama di Kabupaten Jember yang lolos dari penjaminan pelayanan kesehatan.

Banyaknya masyarakat yang masih lolos dari penjaminan kesehatan, pemerintah daerah atau kepala daerah Kabupaten Jember dan dibantu oleh Dinas Kesehatan Jember membuat kebijakan untuk membantu masyarakatnya yang miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Miskin atau disebut SPM yang diterbitkan langsung oleh Dinas Kesehatan Jember sebagai Dinas Teknis Pelaksana. Nama program yang membantu masyarakat miskin yang masih tercecceh di kabupaten Jember adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah. Kebijakan seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember, bahwasanya SPM ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember. Bagaimana dijelaskan dalam dalam peraturan tersebut bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di kabupaten Jember, perlu pemberian dana bagi program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 tahun 2015 ini juga sudah dimuat tujuan program pelayanan kesehatan, ruang lingkup pelayanan kesehatan, tarif pelayanan, anggaran, sumber dana dan lain-lain. Sumber dana yang dikeuarkan juga disebutkan dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 8 TAHUN 2015 UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN JEMBER”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2015 Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2015 Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dan titik tolak bagi peneliti yang ingin mengembangkan teori-teori pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memperkuat strategi dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadikan karya tulis ini menjadi tolak ukur kemampuan memecahkan masalah, dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu pemerintahan yang telah dimiliki untuk masyarakat, serta dapat mengasah kepekaan terhadap isu yang berkembang di dunia sosial dan politik.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian, terutama penelitian dibidang

Pelayanan Publik. Dibawah bimbingan dosen yang kompeten, saya mendapatkan pengalaman yang tak ternilai yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.